

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis bab-bab terdahulu penulis dapat menarik kesimpulan antara lain :

1. Implementasi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan sebagian tugas asisten administrasi umum dalam perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang umum.
 - b. Dalam penerapan peraturan bupati Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas justru tidak ditemui kendala, karna peraturan tersebut memuat standar operasional (SOP) dalam menjalankan perjalanan dinas.
2. Kendala – kendala yang di hadapi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penerapan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang sistem dan prosedur Pelaksanaan Perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :
 - A. Beberapa kendala yang timbul dari luar antara lain :
 - a). kerusakan alat transportasi
 - b). terputus nya akses perjalanan

B. Beberapa kendala yang timbul dari dalam antara lain :

- a). uang harian
- b). biaya transport
- c). biaya penginapan

3. Upaya – upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala dalam penerapan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 di lingkungan Pesisir Selatan ?

- a. Pengantian riil biaya moda transportasi darat, dan laut atau udara untuk pergerakan fisik antar daerah di hitung dari tempat atau lokasi tujuan.
- b. Uang harian di bayarkan secara lumpsun dan secara sekaligus.

B. Saran

1. Agar Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih meningkatkan kinerja nya dalam mengatasi Kendala – kendala yang timbul seperti ada kejadian alam yang membuat sistem dan prosedur menjadi terkendala semisal longsor, banjir, dan lainnya.
2. Agar Kabupaten Pesisir Selatan menimbang kembali agar pelaksanaan perjalanan dinas Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan lebih efisien maka di pandang untuk meningkatkan sistem dan prosedur perjalanan dinas di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pemerintah daerah lebih banyak sharing dan melihat bagaimana cara agar pengimplementasian Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020

DAFTAR KE PUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Arina P, dkk, *Langkah-Langkah Efektif Penyusunan SOP*, Huta Publisher, Depok, 2016, hlm 53
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Sedionigsih, Farida Sukmawati, Nieke P. Soetanto, *Teori dan Praktik Administrasi Kesekretariatan*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm 15
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbaris Kurikulum*, Grasindo, Jakarta
- Sumodiningrat, 1999, *Konsep Good Governance*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- W.J.S. Poerwadarminta, 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta

B. Peraturan Perundang – undangan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara.
- Peraturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- Peraturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 5 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas.
- Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di wilayah Pemerintah Provinsi.
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pesisir Selatan.
- Peraturan Bupati No 2 tahun 2020 Tentang Surat Perintah Perjalanan Dinas.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 11 Tentang Perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2020 Pada Pasal16.Peraturan Daerah dalam Undang – undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang – undang No 12 Tahun 2011.

C. Sumber Lain

Saprina Mamase, 2016, “ Rancang Bangun Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas” Vol. 6, No.2

Nico SS, 2019, Sistem Prosedur Perjalanan Dinas Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Vol. 9, hlm 1

Novi Susanti dkk, 2021“ Pelaksanaan Prosedur Perjalanan Dinas Bagi Pegawai PT. ASABRI (Persero) Jakarta”, Vol. 1, hlm 28-32